BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tunisia adalah sebuah negara merdeka yang terletak di ujung utara benua Afrika yang berhadapan dengan benua Eropa (wilayah Selatan Italia) yang dipisahkan dengan Laut Mediterania. Tunisia menempati posisi geografis yang sangat strategis sebagai penghubung antara Eropa dan Afrika, serta antara bagian Timur dan bagian Barat dunia Arab. Nama resmi negara Tunisia adalah *Republic of Tunisia* atau *al Jumhuriyah at-Tunisiyah*.[1] Tunisia pada zaman dahulu merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Romawi, yang kemudian direbut wilayahnya oleh Kekaisaran Ottoman. Pasca Kekaisaran Ottoman lengser, Tunisia dijajah oleh Perancis hingga akhirnya Tunisia memperoleh kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat tahun 1956.

Setelah Tunisia merdeka, Tunisia dipimpin oleh Habib Burquibah yang memerintah antara 1957-1987. Pemerintahan Bourguiba banyak melakukan perubahan ke arah kemajuan yang cenderung bersifat modernisasi dan westernisasi.[2] Reformasi sosial terutama difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, partisipasi wanita dan perbaikan ekonomi. Pada tahun 1960-an, pemerintah mempraktekkan sistem kebijakan sosialis, tetapi kemudian kembali ke pola liberalisme dengan mempertahankan keterlibatan negara pada beberapa sektor substansial ekonomi.

Bourguiba mengenalkan program baru bagi pembangunan negara Tunisia yang dia sebut sebagai *"Destourian Socialicm"*.[3]

---

[1] Kemlu.go.id, *Profil Negara Republik Tunisia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tunisia*, https://www.kemlu.go.id/tunis/id/Pages/Profil-Negara-Tunisia.aspx dikutip pada 10/09/2019

[2] Ahmad Sukandi, *Politik Bourguiba tentang Hukum Keluarga di Tunisia* (1857-1987) hlm. 101 https://media.neliti.com/media/publications/58090-ID-none.pdf dikutip pada 10/09/2019

[3]William Spencer, 2009. *Global Studies: Middle East*. New York: McGraw Hill inch lm 180

Destourian Socialism menurut Bourguiba merupakan ideologi bangsa yang sosialis namun berlawanan dengan komunisme. Program pembangunan *Destourian Socialism* terdiri atas pembangunan pada aspek sosial dan ekonomi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bourguiba salah satunya ialah memasukkan perempuan ke sekolah-sekolah serta menyamaratakan derajat perempuan dengan laki-laki.

Setelah runtuhnya pemerintahan Burquibah, Tunisia dipimpin oleh Zein Al-Abidin Ben Ali. Pada era pemerintahan Ben Ali, Ben Ali meringankan undang-undang yang membatasi pers dan membebaskan banyak tahanan politik yang banyak dipenjara di pemerintahan sebelumnya. Serta menghapuskan pembatasan kebebasan dan memberikan hak-hak kepada partai politik berdasarkan latar belakang bahasa, ras dan agama.

Pemerintah juga berupaya membuat kehidupan demokrasi di Tunisia. Yaitu dengan kehidupan demokrasi yang sehat, seperti perubahan Undang-Undang (UU) sistem pemilu yang memungkinkan partai oposisi terwakili dalam parlemen, meskipun jumlah pemilihnya sangat kecil. Karenanya, perubahan UU tersebut mendapat tanggapan positif dari sebagian besar kelompok oposisi. Era Ben Ali juga membolehkan wanita ikut andil dalam dunia politik. Meskipun wanita tersebut merupakan kelompok dari opisisi atau yang menentang kepemimpinan Ben Ali di Tunisia.

Pemilu pertama Tunisia era Ben Ali dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1994. Pemilu ini bertujuan untuk memilih Dewan Perwakilan dan Presiden. Masa kampanye berlangsung dari tanggal 6 sampai 18 Maret. Sebagai hasil dari Undang-undang Pemilu yang baru, enam partai oposisi yang dibentuk secara hukum menantang RCD, yang sebelumnya memegang semua kursi di Parlemen. Di sisi lain, partai Islam Al-Nahda atau Ennahda dilarang tampil. Pemilu diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 1994. Secara keseluruhan ada 630 kandidat yang bersaing untuk memperebutkan 163 kursi. RCD berhasil memperoleh 144 dari 163 kursi yang ada. Ben Ali kembali terpilih sebagai Presiden Tunisia dengan perolehan 99 persen suara dan menjadi satu-satunya kandidat dalam pemilu. Dari 163

kursi di Parlemen 152 kursi diduduki oleh laki-laki dan 11 kursi diduduki oleh perempuan.[4]

Pada 25 Oktober 2009 pemilu diselenggarakan. Dalam pemilu ini Ben Ali kembali memenangkan pemilu presiden Tunisia untuk yang kelima kalinya. Ben Ali menang dengan persentase suara sebesar 89 persen, namun persentase kemenangannya ini menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Posisi kedua ditempati oleh Mohamed Bouchiha dari partai PUP yang memperoleh 5,01 persen. Sementara itu, di posisi ketiga adalah Ahmed inoubli yang mendapatkan 3,8 persen. Serta kandidat terakhir, Ahmed Brahim dari Ettajdid, atau gerakan perubahan, mendapatkan perolehan paling kecil dengan 1,57 persen.[5]

Ben Ali berhasil meluluhkan hati rakyatnya dengan keberhasilannya dalam mensejahterahkan kehidupan rakyat Tunisia. Ini dapat dilihat saat Tunisia pernah bergabung dalam *European Union* (EU), dengan bergabungnya Tunisia dalam perserikatan tersebut, Tunisia mampu meningkatkan hasil ekspor zaitun dan jeruk. Berhasil dalam bidang perekonomian, Ben Ali ingin mengangkat Tunisia ke jajaran negara-negara maju.

Ben Ali juga berkomitmen untuk menurunkan angka pengangguran. Dengan menyelenggarakan program pengembanngan keterampilan. Pembukaan lapangan pekerjaan juga diutamakan bagi usia produktif mengingat jumlah pengangguran tertinggi terdapat pada usia muda. Hampir sepertiga pengangguran memiliki kualifikasi pendidikan tinggi dan dua pertiga dari tuntutan pekerjaan tambahan yang berasal dari kategori pencari kerja ini.

Selama pemerintahan Ben Ali, Tunisia memiliki catatan bagus dalam pengelolaan keuangan. Oleh Dana Moneter Internasional (IMF), Tunisia dipuji karena fondasi ekonomi yang

---

[4] Archive.ipu.org, *Tunisia Parliamentary Chamber: Majlis Al-Nawab elect ion held in 1994*, http://archive.ipu.org/parline-e/reports/arc/ 232 1_94. htm dikuti pada 14/09/2019

[5] Republika.com, 27/10/2019, *Ben Ali Kembali Menangkan Pemilu Tunisia*, http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/09/ 10/27/85 124-ben-ali-kembalimenangkan-pemilu-tunisia dikutip pada 14/09/2019

solid dan upaya nyata modernisasi. Tunisia juga dijadikan model untuk bebas buta aksara, kesejahteraan sosial, dan peran perempuan dalam masyarakat. Tunisia terhitung relatif sekuler dan pemain moderat di dunia Arab sehingga menjadi sekutu diplomatik serta bisnis AS dan Eropa.[6]

Namun, keberhasilannya dalam perekonomian dan politik tidak berlangsung lama karena setelah sekian lama memimpin Tunisia. Ben Ali yang berjanji menghilangkan sisa kediktatoran Bourguiba justru mempraktekkan hal yang sama. Demokrasi yang selalu digemborkan oleh Ben Ali pada awal jabatannya terbukti tidak terlaksana dengan baik.

Sebelum terjadinya *Arab Spring*, Tunisia merupakan negara sekuler yang menganut sistem demokrasi elektoral, dimana presiden dipilih melalui mekanisme pemilu dengan masa jabatan selama 5 tahun. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Tunisia adalah sistem pemerintahan Republik Parlementer yang kepala negaranya adalah seorang Presiden sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Presiden Tunisia dipilih secara langsung oleh rakyatnya untuk masa jabatan 5 tahun sedangkan Perdana Menteri dipilih oleh parlemen yang pada umumnya adalah pemimpin partai atau koalisi mayoritas. Parlemen Tunisia yang disebut dengan *unicameral Assembly of the Representatives of the People* atau *Majlis Nuwwab ash-Sha'b* ini terdiri dari 217 kursi dengan masa jabatan 5 tahun.[7]

"*The Arab Spring*" atau Musim Semi Arab, adalah bahasa politik yang mulai popular dalam dunia Islam, terutama di negara-negara Arab. Kata tersebut menjadi bahasa yang popular, dalam kajian politik dunia Islam, sejak awal Januari 2011 lalu.

---

[6] Kompas.com, 26/10/2009 dengan judul *"Sudah 22 Tahun Ben Ali Berkuasa"*, https://internasional.kompas.com/read/2009/10/26/05564739/Sudah.22.Tahun.Ben.Ali.Berkuasa%20diakses%20pada%2021%20Januari%202018 dikutip pada 09/09/2019

[7] Ilmupengetahuanumum.com, 15/09/2019, dengan judul "*Profil Negara Tunisia"* https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-tunisia/ dikutip pada 10/09/2019

Istilah yang menunjukkan kejatuhan berderet rezim pemimpin-pemimpin otoriter dunia Arab, dimulai dari Tunisia, Zein Al-Abidin Ben Ali (Ben Ali), diikuti Mesir dengan tergulingnya Hosni Mubarak, kemudian ke Libya, yang berhasil mengakhiri era kediktatoran Moammar Khadafy yang sudah berlangsung kurang lebih 40 tahun lamanya.[8]

Pada gelombang demokratisasi di kawasan Timur Tengah lahir beberapa pemerintahan baru maupun negara-nasional baru seperti terbentuknya Republik Syria dan Libanon pada tahun 1941 serta pemerintahan Republik Arab Mesir pada tahun 1947. Namun, pada tahun 1970-an, Timur Tengah, diwarnai dengan berbagai revolusi seperti, revolusi rakyat Libya pimpinan Moamar Khaddafi pada tahun 1969 dan Revolusi Irak pimpinan Saddam Hussein pada tahun 1971. Revolusi ini muncul sebagai reaksi dari sikap pemerintah yang otoriter. Pada gelombang ketiga, demokratisasi menjalar ke Iran pada tahun 1979. Revolusi Republik Revolusioner Islam Iran tahun 1979 pimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini menggulingkan kekuasaan Shah Mohammad Reza Pahlavi.[9]

The Arab Spring yang menjadi awal kebangkitan harapan akan kehidupan yang lebih baik dan lebih demokratis di kawasan Timur Tengah, terutama dunia Arab, justru menampilkan wajah yang lebih menyeramkan. Musim semi itu kini telah mengorbankan ratusan ribu jiwa umat manusia, mencapai lebih 370.000 orang di Suriah sampai saat ini.[10]

---

[8] Ahmad Sahide, Syamsul Hadi, Siti Muti'ah Setiawati, dan Bambang Cipto. 2015. *The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya.* Jurnal Hubungan Internasional Vol 4. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta. Hlm 119-120 http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2237/2187 dikutip pada 10/09/2019

[9] Sidik Jatmika, 2013, "*The Arab Spring 2010: Puncak Gunung Es Krisis Politik di Kawasan Timur Tengah*", Jurnal Hubungan Internasional vol.2 No.2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta hlm. 159 http://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/343/391 dikutip pada 14/09/2019

[10] kompas.com 15/03/2019 , dengan judul *" Delapan Tahun Perang Di Suriah Lebih dari 370.000 Orang Tewas"*, https:// internasional.

Konflik politik yang terus mewarnai negara-negara Arab tersebutlah sehingga perhatian dunia semakin tertuju ke kawasan ini setelah bergulirnya Musim Semi Arab (*The Arab Spring*) sejak awal tahun 2011 lalu atau "uprisings" dalam istilah Tariq Ramadhan untuk menggambarkan karakter umum dari gerakan massa yang telah mengguncangkan dunia Arab.[11] Gejala yang dalam Bahasa Crane Brinton merupakan keadaan sosial yang demam. Suatu keadaan yang berlawanan dengan sehat yang 'normal'.

Setelah sindrom *The Arab Spring* menjadi bagian dari alur sejarah Timur Tengah dan negara-negara Arab pada khususnya, demokrasi pun menjadi pembicaraan yang menarik dan hangat untuk membaca masa depan politik kawasan pertemuan tiga benua tersebut; Eropa, Asia, dan Afrika (Drysdale, 1985: 12). Namun demikian, menurut pelacakan sejarah Halim Barakat, demokrasi sebenarnya telah menjadi urutan teratas dalam daftar tuntutan masa dunia Arab sejak tahun 1990-an.[12]

Pasca lengsernya Ben Ali sebagai presiden di Tunisia tahun 2011, masyarakat menuntut pemerintah Tunisia untuk segera membentuk pemerintahan sementara. Presiden sementara Foued Mebazaa meminta Perdana Menteri Mohammed Ghannouchi untuk membentuk pemerintah koalisi. Langkah ini dipandang sebagai upaya dalam menyelamatkan pemerintah dari ambang kehancuran. Mebazaa mengatakan kepentingan nasional lebih diutamakan dengan membentuk pemerintah persatuan nasional, tindakan Mebazaa tersebut mendapat dukungan dari para pemimpin oposisi di Tunisia. Pemerintah persatuan darurat

---

kompas.com/read/2019/03/15/17513181/delapan-tahun-perang-di-suriah-lebih-dari-370000-orang-tewas?page=all dikutip 09/10/2019

[11] Ramadan, Tariq, *"Islam and the Arab Awakening"*. New York: Oxford University Press, 2012 hal 8

[12] Barakat, Halim, "*Dunia Arab, Masyarakat, Budaya, dan Negara*". Bandung: Nusa Media, 2012 hal 373

akan secepatnya dibentuk untuk mengakhiri kerusuhan yang mencekam negara tersebut.[13]

Presiden sementara Tunisia Fouad Mebazaa mengumumkan rincian pemilu yang dijanjikan setelah tumbangnya rezim presiden Ben Ali. Mebazza mengatakan pemungutan suara untuk membentuk dewan perwakilan yang akan merancang ulang konstitusi akan digelar 24 Juli mendatang. Hingga pemilu digelar maka pemerintahan interim tetap akan menjalankan roda pemerintahan Tunisia. Mebazza menegaskan tetap menjabat sebagai presiden sementara meski konstitusi saat itu membatasi masa jabatan seorang pejabat presiden hanya selama 60 hari. Setelah terpilih, dewan konstitusi dapat menunjuk pemerintahan baru atau meminta pemerintah sementara untuk tetap menjalankan tugas hingga pemilihan presiden atau parlemen digelar.[14]

Mebazaa juga mengatakan semua partai politik termasuk oposisi akan diajak berkonsultasi. Mebazaa akan tetap menjadi presiden sementara sampai parlemen baru mulai bekerja, lapor kantor berita resmi negara itu. Setidaknya tiga pejabat pemerintah Tunisia mengundurkan diri, setelah pengunduran diri Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi.[15]

Menteri Pendidikan Tinggi dan Penelitian Ilmiah, Ahmad Ibrahim dan Sekretaris Pendidikan Tinggi, Faouzia Farida Charfi, juga mundur hari Selasa, lapor kantor berita Tunis Afrique Presse. Mohamed Nouri Jouini, menteri kerjasama internasional dan perencanaan, mengundurkan diri Senin, kata kanto berita itu. Setelah Ghannouchi mengundurkan diri,

---

[13] Liputan6.com, 16/01/2017, dengan judul *"Presiden Pengganti Diminta Bentuk Pemerintahan"*, https://www.liputan6.com/global/read/ 316117/ presiden-pengganti-diminta-bentuk-pemerintahan dikutip pada 9/09/2019

[14]BBC.com, 04/03/2011, dengan judul *"Pemerintah Tunisia Canangkan Pemilu"*, https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/03/110303_tuniselection dikutip pada 10/09/2019

[15] Kompas.com, 04/03/2011, dengan judul *"Tunisia Gelar Pemilu Parlemen Juli"*, https://tekno.kompas.com/read/2011/03/04/14074229/tunisia.gelar.pemilu.parlemen.juli dikutip pada 15/09/2019

Presiden Mebazaa menetapkan Al-Baji Qa'ed Al-Sebsi sebagai perdana menteri baru negara itu.[16]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka peneliti merumuskan pertanyaan, adalah :

Bagaimana proses demokratisasi di Tunisia Pasca Arab Spring Tahun 2011-2013?

C. Kerangka Dasar Teori

Tiga jenis proses demokratisasi Dunia Ketiga sebagaimana yang dikemukakan oleh Samuel Huntington, yaitu :

1. Transformasi

Terjadi ketika elit yang berkuasa mempelopori proses perwujudan demokrasi. Dalam transformasi, pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter mensponsori perubahan dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sebuah sistem yang demokratis. Transformasi mensyaratkan pemerintah harus lebih kuat daripada pihak oposisi. Transformasi terjadi di Brazil, Spanyol dan Hungaria. Transformasi berkembang melalui lima fase utama, yaitu: munculnya kelompok pembaharu, memperoleh kekuasaan, adanya kegagalan liberalisasi, munculnya legitimasi untuk menaklukan kelompok konservatif dan yang terakhir adalah mengikutsertakan kelompok oposisi.

2. *Replacement* (Pergantian)

Terjadi ketika kelompok oposisi mempelopori proses perwujudan demokrasi dimana kemudian rezim otoriter tumbang atau digulingkan. Replacement merupakan sebuah transisi yang matang dan lemah, proses ini sangat tergantung dengan kontinuitas perjuangan dari mereka yang memiliki komitmen yang kuat dengan membangun demokrasi. Kelompok pembaharu masih lemah atau tidak ada dalam rezim tersebut. Unsur-unsur dominan dalam pemerintahan

[16] Ibid hlm 8

adalah kelompok konservatif yang dengan gigih menentang perubahan rezim. Akibatnya, demokratisasi baru bisa terwujud apabila kelompok oposisi makin kuat dan pemerintah semakin lemah sehingga jatuh dengan sendirinya atau digulingkan.

Kelompok yang dulunya merupakan kelompok oposisi kini berkuasa dan ketika kelompok-kelompok dalam pemerintahan yang baru saling berselisih mengenai hakikat rezim yang seharusnya mereka lembagakan, maka nonflik tersebut memasuki fase baru. Proses replacement, terdiri dari tiga fase, yaitu: perjuangan untuk menumbangkan rezim, tumbangnya rezim dan perjuangan setelah tergulingnya rezim. Beberapa negara di Timur Tengah pun mengalami penggulingan pemerintah, diantaranya Mesir yaitu tumbangnya presiden Hosni Mubarak, presiden Muammar Khadafi di Libya, serta presiden Ali Abdullah Saleh di Yaman.

3. *Transplacement*

Terjadi jika demokrasi merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok pemerintah dan kelompok oposisi. Kelompok konservatif dalam rezim berada pada posisi yang seimbang dengan pemerintah, tetapi pemerintah sendiri hanya bersedia merundingkan perubahan, dan tidak mau memprakarsai perubahan rezim. Hal ini sangat berbeda dengan adanya dominasi kelompok konservatif yang menimbulkan *replacement*.

Huntington juga memaparkan hambatan-hambatan menuju demokrasi. Ada tiga penghambat utama demokratisasi yaitu, politik, ekonomi dan budaya. Huntington berpendapat bahwa hambatan yang paling sulit untuk diruntuhkan adalah budaya. Hal ini terjadi di negara-negara Timur Tengah yang banyak dipengaruhi budaya Islam dan negara-negara Asia Timur yang menganut aliran konfusianisne. Faktor ekonomi dan politik yang saling berhubungan dalam menghambat terjadinya demokratisasi.

Hal ini banyak terjadi di negara-negara berkembang dan miskin seperti Asia dan Afrika.[17]

4. Konsep Demokrasi

Istilah demokrassi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" berarti rakyat dan "kratos" yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Dimana rakyat diikutsertakan dalam demokrasi tersebut dan rakyat juga sebagai pemegang kekuasaan serta mengontrol jalannya suatu pemerintahan. Banyak dari cendikiawan masa lampau yang mencoba untuk menjabarkan apa dan bagaimana arti dari demokrasi dalam suatu penyelenggaraan negara.

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari *polis* yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan penduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas daan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*eccelesia*), dimana seluruh warga negara ikut serta dalam urusan penyelanggaraan negara.[18]

D. Hipotesa

Proses demokratisasi di Tunisia pasca Arab *Spring* tahun 2011-2013, melalui tiga proses :

Yakni lengsernya rezim Ben Ali, terpilihnya Mebazza sebagai presiden sementara, hingga Moncef Marzouki terpilih sebagai presiden secara demokratis.

---

[17] Samuel P. Huntington, 1991, *Democracy"s Third Wave, Journal of Democracy*, Vol. 2 No.2 Spring 1991 hlm. 20-22 http://www.ned.org/docs/Samuel-P-Huntington-Democracy-ThirdWave.pdf dikutip pada 14/09/2019

[18] Benny Bambang Irawan, *"Perkembangan Demokrasi di Indonesia"*, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 5 No.1, 2007, hlm 55

E. Tujuan Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana demokrasi di Tunisia pasca Arab *Spring* tahun 2011-2013.
2. Sebagai bahan penelitian dari studi kasus di Timur Tengah serta memperkaya kajian Ilmu Hubungan Internasional yang terkait dengan judul ini, yaitu mata kuliah Politik dan Pemerintahan Timur Tengah.
3. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu (1).

F. Metode Penelitian

Pengumpulan data merupakan langkah metode ilmiah, dalam menyusun skripsi nanti, penulis menggunakan metode kepustakaan atau penelitian kepustakaan (*library research*). Dimana dalam mengumpulkan data digunakan metode literature yaitu dengan cara menelaah buku-buku, makalah-makalah ilmiah, jurnal-jurnal, Koran, majalah, artikel, internet (*website*) dan sumber-sumber lain yang dianggap relevan. Data yang diperoleh nantinya akan dianalisa dengan menggunakan kerangka dasar pemikiran yang tealh ditetapkan.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penulis menggunakan batasan waktu dari tahun 2011-2013, didasarkan atas jangka waktu lengsernya Ben Ali di Tunisia.

Pada awal tahun 2011, masyarakat Tunisia berdemo yang berlangsung dijalanan atas peristiwa aksi bakar diri dari seorang warga Tunisia. Tak sedikit para demonstran mendapatkan perlakuan yang kasar dari aparat keamanan. Ditahun ini juga merupakan tahun terakhir Ben Ali berkuasa

Pada tahun-tahun berikutnya pemerintah Tunisia membentuk pemerintahan sementara untuk meredakan suasana yang mencekam saat itu. Perdana Menteri Ghannouchi sempat mengambil alih kekuasaan setelah mendapat tugas dari Ben Ali untuk menggantikannya. Ghannouchi berjanji akan melakukan

reformasi untuk memulihkan stabilitas politik dan sosial Tunisia. Namun keesokan harinya, Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan kepergian Ben Ali permanen dan ia Ketua Parlemen Fouad Mebazza sebagai Presiden interim.[19]

H. Sistematika Penulisan

Bab I merupakan bab pengantar yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan daftar pustaka.

Bab II membahas dinamika sosial politik Tunisia yaitu diantaranya : kondisi geografis Tunisia, kondisi konomi Tunisia, kondisi politik dan perubahan sistem pemerintahan Tunisia, kondisi sosial dan budaya.

Bab III membahas awal mula Arab *Spring* muncul di Tunisia, Pemerintahan Tunisia era Ben Ali, pemerintahan Tunisia era Foued Mebazaa dalam menjalankan demokrasi di Tunisia.

Bab IV membahas tentang analisis hipotesa yaitu jawaban atas rumusan masalah yang ada. Berupa *Replacement* terjadi karena adanya suatu peristiwa yang menjadi awal mula penggulingan rezim dimana peristiwa tersebut datang dari kelompok yang lemah. Dalam gejolak yang terjadi di Tunisia tersebut, ada tiga tahap yang dilalui Tunisia dalam proses demokratisasi, yaitu sebagai berikut :

1. Lengsernya Ben Ali.
2. Foued Mebazza sebagai presiden sementara.
3. Terpilihnya Moncef Marzouki.

Bab V berisi kesimpulan.

---

[19] *"Mebazza Presiden Interim Tunisia"*, Kedaulatan Rakyat (Senin, 17 Januari 2011)